PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM MEWUJUDKAN STRATEGI PERTAHANAN DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG

Drs. Sindu Tikno Seputro*, Unhan, sindutiknoseputro@yahoo.co.id

Abstrak *- Banyak hal yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan strategi pertahanan di wilayah perbatasan seperti Entikong di Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Wilayah perbatasan Entikong memiliki fungsi militer strategis sehingga ditempatkan Satuan tugas pengamanan di sepanjang perbatasan. Belum terbangunnya infrastruktur jalan pada tataran praktis berdampak pada strategi pertahanan di wilayah tersebut. Hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif bahwa pelaksanaan kebijakan strategi pertahanan di wilayah perbatasan Entikong perlu didukung infrastruktur jalan yang memadai guna mendukung pengerahan satuan tugas pengamanan perbatasan.*

Abstract *- Many things that be an indicator of successful implementation of the defense strategy in boundary areas such as Entikong in the Sanggau District which borders Malaysia Sarawak. Entikong border region has strategic military functions so especially the security task force deployed. Un available of road infrastructure on a practical level has coused on the defense strategy in the border. Methods This study is the design of qualitative descriptive approach that is intended to describe in detail about the development of road infrastructure in Entikong in realizing the strategy of defense in border areas Entikong. The results of qualitative research describe that implementation of the policy strategy in Entikond border areas should be supported by adequate of road infrastructure to support speed of the deployment of retrofitting units.*

Kata kunci : *infrastruktur, strategi, perbatasan*

PENDAHULUAN

Fungsi utama jalan raya adalah untuk melayani lalu lintas. Lebih tegasnya untuk memungkinkan bergeraknya kendaraan-kendaraan guna mengangkut manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya [1]. Breheny (1995) (dalam Banister 1995) [2] mengatakan bahwa transportasi memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan daerah dan ekonomi kota dan wilayah. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa jalan mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan [3]. Pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Entikong tertumpu pada poros jalan utama atau jalan negara yang menghubungkan kota Pontianak ke Sarawak Malaysia melalui Entikong, sehingga perkembangan ekonomi cenderung di sepanjang jalan poros utama. Sementara

* Sindu Tikno Seputro, M.Si (Han), alumnus Program Pasca Sarjana UNHAN.

di wilayah pedalaman yang sejajar garis perbatasan negara tidak terdapat infrastruktur jalan sehingga perkembangannya lambat, dikarenakan aksesibilitas antardesa dan ke kecamatan rendah.

Berkaitan dengan strategi pertahanan di wilayah perbatasan dengan menempatkan satuan militer di sepanjang wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang disebar dalam pos-pos pengamanan perbatasan memerlukan infrastuktur jalan yang memadai, sebagai sarana patroli, pengerahan pasukan maupun dukungan logistik. Sayangnya kondisi infrastruktur tidak terpenuhi diwilayah perbatasan Entikong yang tertutup oleh hutan, bukit, dan lembah. Akibat nya di sepanjang wilayah perbatasan banyak terjadi kasus/pelanggaran yang dapat mengancam pertahanan di wilayah perbatasan khususnya ancaman pelanggaran wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pengembangan infrastruktur jalan dan relevansinya dengan perwujudan strategi pertahanan di wilayah perbatasan dengan pertanyaan "Bagaimana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Entikong dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan". Untuk membahas masalah tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif, menurut Kountur [4] bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya menurut Nurul Zuriah [5] *descriptive research* diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat menggambarkan perkembangan infrastruktur jalan di Entikong dalam mewujudkan strategi pertahanan di wilayah perbatasan. dan mendetail berdasarkan pada teori, pendapat para ahli yang dihadapkan pada data-data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, observasi lapangan, wawancara. Data-data valid dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

Pengembangan Infrastruktur Jalan dalam Mewujudkan Tugas Pengamanan Perbatasan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang TNI disebutkan bahwa mengamankan wilayah perbatasan adalah bagian dari tugas pokok TNI. Dalam rangka melaksanakan tugas mengamankan

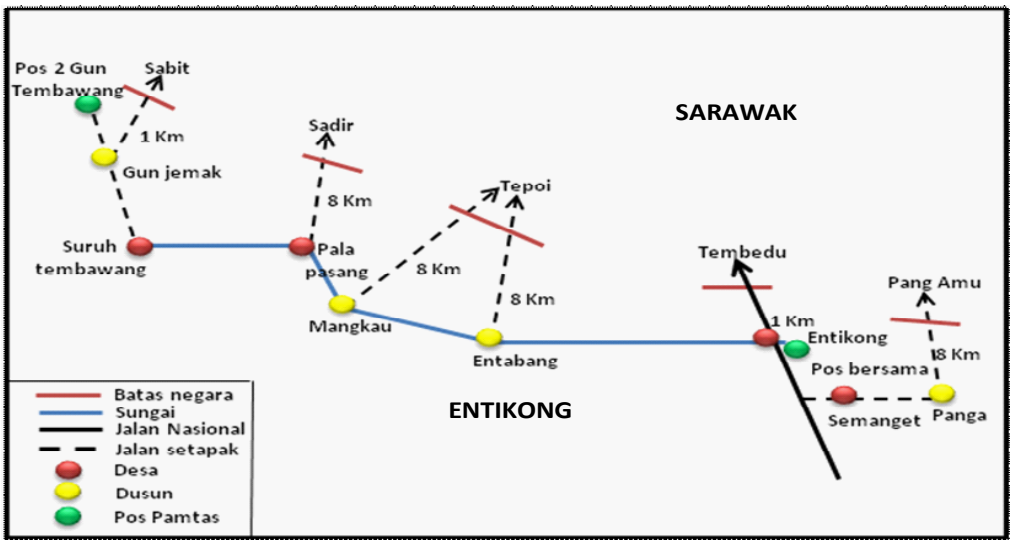

Gambar 1. Jaring Jalan Disepanjang Perbatasan Entikong

wilayah perbatasan tersebut TNI telah menempatkan pasukannya di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang tersebar dalam 31 pos dimana 2 pos berada di wilayah perbatasan Entikong. Pasukan pos pengamanan perbatasan dalam melaksakan tugas patroli perbatasan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia diantaranya adalah infrastruktur jalan. Dari gambar 1 tentang jaring jalan yang ada disepanjang perbatasan Entikong terlihat bahwa antara pos pengamanan perbatasan 1 dengan pos pengamanan perbatasan 2 tidak terhubungkan dengan jaring jalan yang memadai. Dari gambar sket jalan tersebut telihat bahwa untuk menuju pos pengamanan perbatasan di Gun Tembawang dari Kecamatan Entikong tersedia infrastruktur jalan desa yang sangat terbatas dan yang terpanjang adalah jalur sungai. Jarak antara pos 1 dengan pos 2 di Entikong kurang lebih 40 km, jika menggunakan jalur sungai dapat ditempuh dengan waktu 6 jam dan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 7 jam.

Demikian juga dengan kondisi desa disepanjang perbatasan belum terdukung infrastruktur jalan yang memadai, sehingga penduduk harus menggunakan jalur transportasi sungai. Banyak terdapat jalan tikus/jalan pendekat untuk menuju wilayah Sarawak dengan jarak yang sangat dekat. Adanya pengembangan jalan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan belum sepenuhnya dapat menghubungkan antardesa mengingat luasnya wilayah disepanjang perbatasan.

Dalam teori jalan dijelaskan bahwa fungsi jalan raya adalah untuk melayani lalu lintas, lebih tegasnya untuk memungkinkan bergeraknya kendaraan-kendaraan guna mengangkut manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Apabila jarak antara pos 1 dengan pos 2 tersedia infrastruktur jalan yang memadai maka dengan jarak 40 km dan dengan kecepatan kendaraan 40-60 km/jam waktu yang dapat ditempuh kurang lebih1 jam. Sementara itu dari desa-desa disepanjang wilayah perbatasan untuk menuju ke Entikong juga tidak tersedia infrastruktur jalan, namun tersedia jalan tikus untuk menuju ke wilayah Sarawak dengan jarak yang sangat dekat yaitu jarak terdekat 1 km dan terjauh 8 km, apabila berjalan kaki maka waktu tempuhnya antara 10 menit sampai 1,5 jam.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan, apabila pasukan pos 2 akan melaksanakan patroli di sepanjang perbatasan dari pos Gun Tembawang menuju ke desa Pala Pasang, harus di tempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak ke desa Suruh Tembawang dan dilanjutkan dengan menggunakan jalur angkutan sungai menuju desa Pala Pasang, waktu tempuh yang di perlukan cukup lama. Sementara itu perjalanan masyarakat dari desa Pala Pasang menuju ke Sadir Sarawak melalui jalan tikus dengan jarak 8 km, waktu tempuh yang di perlukan dengan berjalan kaki hanya 1,5 jam.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa kecepatan pasukan patroli kalah dengan kecepatan oknum masyarakat untuk menerobos perbatasan melalui jalan tikus. Apabila di wilayah perbatasan Entikong terdapat infrastruktur jalan yang memadai maka kecepatan pasukan patroli dengan kecepatan masyarakat dalam menerobos perbatasan akan berimbang. Sebagai contoh wilayah perbatasan Sarawak Malaysia seperti yang disampaikan oleh Dansatgaspamtas Letkol Inf Tri Saktiyono saat FGD tanggal 7 Juli 2011 bahwa di sepanjang perbatasan Sarawak dengan panjang 966 km hanya ditempatkan sebanyak 6 pos karena telah tersedia infrastruktur jalan yang memadai yang dapat di manfaatkan untuk patroli dengan berkendaraan dalam waktu yang cepat, sementara di sepanjang perbatasan Kalbar

dengan panjang yang sama di tempatkan 31 pos karena wilayahnya masih tertutup dan belum tersedia infrastrutur jalan yang memadai [6]. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa pasukan pengaman belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal akibat dari tidak tersedianya infrastruktur jalan yang memadai. Kondisi ini akan mengakibatkan rentannya pertahanan wilayah perbatasan terhadap ancaman pelanggaran wilayah.

Pengembangan Infrastruktur Jalan Dalam Mewujudkan Kecepatan Pengerahan Perkuatan Pasukan dari Satuan Atas.

Selain ancaman pelanggaran wilayah, di wilayah Entikong juga sangat mungkin terjadi ancaman lain seperti ancaman konflik komunal, terorisme, pemberontakan bersenjata maupun ancaman dari luar negara mengingat posisi wilayah perbatasan yang sangat jauh dari ibukota provinsi dan berhadapan langsung dengan negara tetangga yang perlu diantisipasi secara dini. Dengan komposisi pasukan di sepanjang perbatasan Entikong yang sangat kecil hanya 1 peleton yaitu 1 regu di pos gabma dan 1 regu di pos Gun Tembawang yang tempatnya cukup jauh dari Entikong dan 1 regu siap di Posko, ada kemungkinan akan sulit untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut, sehingga perlu perkuatan pasukan dari satuan atas yang berada di Pontianak maupun pasukan terdekat di wilayah Sanggau maupun Ngabang dan Anjungan dalam mendukung pertahanan di wilayah perbatasan. Permasalahan ini tidak dapat digambarkan berdasarkan data tentang pelaksanaan permasalahan tersebut, mengingat dari data yang ada di wilayah perbatasan Entikong belum pernah terjadi ancaman tersebut, sehingga data yang digunakan adalah data berdasarkan pengalaman satuan bergeser ke wilayah perbatasan saat melaksanakan tugas sebagai Satgaspamtas dan pengalaman penulis saat melaksanakan penelitian lapangan dan berdasarkan teori.

Dalam teori jalan dijelaskan bahwa fungsi utama jalan raya adalah untuk melayani lalu lintas, lebih tegasnya untuk memungkinkan bergeraknya kendaraan-kendaraan guna mengangkut manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Adalah penting sekali bahwa lalulintas kendaraan diatas jalan raya terselenggarakan secara lancar dan aman sehingga pengangkutan berjalan dengan cepat, tepat, aman, efisien, ekonomis [7]. Dalam teori jalan juga di jelaskan bahwa Jalan Utama yaitu jalan yang harus melayani lalu lintas tinggi (lalulintas cepat dan berat) antara kota-kota penting atau antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat ekspor.

Fungsi jalan dalam mewujudkan kecepatan pengerahan perkuatan pasukan dari satuan atas dapat digambarkan bahwa jarak dari kota Pontianak ke Entikong adalah 317 km, dihadapkan pada kondisi poros jalan utama (jalan negara) dengan lebar 6 m dan dengan kondisi permukaan jalan aspal yang kurang optimal serta kondisinya yang berbelok-belok, maka kecepatan kendaraan yang dapat dicapai adalah antara 40 – 60 km/jam atau rata-rata 50 km/jam. Sehingga waktu tempuh antara Pontianak untuk menuju Entikong adalah 317 km : 50 km/jam = 6 jam lebih, berdasarkan pengalaman penulis saat melaksanakan penelitian berangkat dari Pontianak melalui poros jalan Pontianak-Tayan-Sosok-Entikong dengan kondisi lebar jalan 16 m sepanjang 95 km (5 km rusak berat/dalam proses pembangunan) sampai dengan Tayan, dilanjutkan melalui jalan dengan lebar 6 m sampai Entikong waktu tempuhnya 5,5 jam, saat pulang melalui jalan negara yaitu poros jalan Entikong-Sosok-Ngabang-Anjungan-Sei-Pontianak dengan lebar jalan 6 m dan kondisi jalan baik serta berkelok-kelok memerlukan waktu tempuh 7

jam. Sedangkan untuk pengerahan pasukan dari satuan yang terdekat yaitu Yonarmed 16 di kabupaten Ngabang dengan jarak 130 km waktu tempuh yang diperlukan adalah 137 km : 50 km/jam = 2,7 jam, satuan lain yang terdekat yaitu Kompi B Yonif 642 di Kabupaten Sanggau dengan jarak 174 km waktu tempuh yang diperlukan adalah 174 km : 50 km/jam = 3,5 jam, pengalaman penulis saat penulis berkunjung ke Kodim Sanggau, jarak tempuh dari Sanggau ke Entikong di tempuh dengan waktu 4 jam karena kondisi jalannya lebar 6 m dan sebagian besar rusak berat. Apabila pengerahan pasukan Yonif 643 dan Denzipur 7 dari Anjungan ke Entikong dengan jarak 207 km diperlukan waktu tempuh 4 jam (207 : 50 km/jam).

Apabila poros jalan Pontianak-Tayan-Sosok-Entikong dengan jarak 245 km dilanjutkan pembangunannya dengan lebar jalan 16 m dengan lapis permukaan yang memadai maka kecepatan kendaraan dapat meningkat menjadi rata-rata 80 km/jam sehingga jarak tempuh yang semula 5 jam dapat meningkat menjadi 245 km : 80 km/jam = 3 jam, demikian juga dengan poros Anjungan-Ngabang-Sosok-Entikong dengan jarak 207 km yang semula ditempuh dengan waktu 4 jam dapat ditingkatkan menjadi 207 km : 80 km/jam = 2,5 jam. Sedangkan dari Ngabang hanya 1 jam lebih. Secara visual digambarkan sebagai berikut :

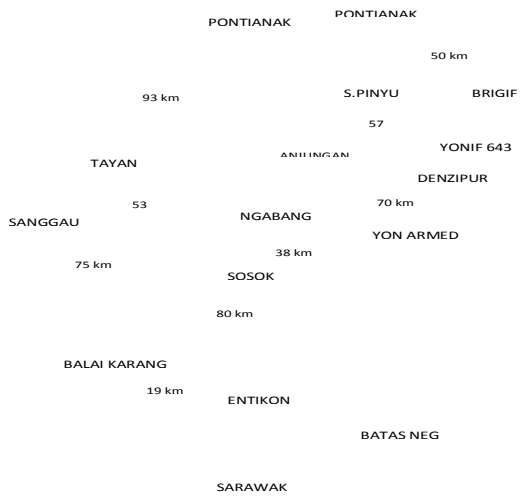

Gambar 2. Sket Jaring Jalan dari Pontianak menuju Entikong

Dari analisa data tersebut terlihat bahwa kecepatan pengerahan pasukan dari Pontianak maupun dari Sanggau, Ngabang dan Anjungan untuk menuju ke Entikong memerlukan waktu yang cukup lama.

Pengembangan Infrastruktur Jalan Ditinjau dari Ancaman.

Pengembangan infrastruktur jalan di wilayah Entikong dari tahun 2005 - 2010 masih terlihat tidak ada pengembangan yang berarti dimana jalan yang tersedia hanya jalan negara sebagai jalan poros utama dari Pontianak menuju Sarawak melalui Entikong dengan kondisi baik, sedangkan jalan Propinsi tidak tersedia, sementara itu untuk jalan kabupaten/kota yang tersedia sebagai jaring jalan dilingkungan Entikong dalam bentuk jalan aspal dan tanah. Staf Kantor Kecamatan Entikong Bapak Jalianus saat FGD menyampaikan bahwa untuk jalan desa yang tersedia di wilayah Entikong merupakan jalan tanah, jalan kerikil, maupun jalan beton dengan lebar jalan antara 1-2 m, jalan desa setiap tahunnya terdapat pengembangan panjangnya melalui program TMMD, program PNPM mandiri maupun swadaya masyarakat untuk kepentingan desanya dan sejalan dengan bertambahnya perumahan penduduk. Namun demikian dengan bertambahnya panjang jalan desa, tetap belum dapat menghubungkan dari desa yang satu ke desa lainnya di sepanjang perbatasan [8]. Pasukan pengaman perbatasan untuk menuju pospamtas yang terdekat saja yaitu di pos Gun Tembawang seperti yang disampaikan oleh Dansatgaspamtas Letkol Inf Tri Saktiyono saat FGD yaitu harus melalui jalan sungai selama 6 jam baru dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 7 jam. Kondisi tersebut menggambarkan betapa sulitnya menembus

wilayah perbatasan karena terbatasnya infrastruktur jalan, sementara itu apabila melalui jalan yang ada di wilayah Sarawak dengan menggunakan kendaraan hanya memerlukan waktu 1 jam saja [9].

Terbatasnya infrastruktur jalan yang menghubungkan antardesa di sepanjang perbatasan mengakibatkan banyaknya permasalahan yang terjadi, khususnya pelanggaran wilayah terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di sepanjang perbatasan yaitu menjual hasil bumi, belanja maupun mengunjungi sanakkeluarganya, selain itu beberapa kasus terjadi di sepanjang perbatasan yaitu tertangkapnya imigran Iraq menerobos ke Entikong melalui jalan tikus pada hari senin, tanggal 14 Desember 2010 yang telah dapat digagalkan, maupun tertangkapnya penyelundupan barang berupa Gula dan bawang putih di perbatasan melalui jalan tikus oleh oknum masyarakat dan kemungkinan masih banyak kasus lain yang lolos dari pemeriksaan, penyelundupan TKI ilegal melalui jalan tikus, maupun pencurian kekayaan alam melalui jalan tikus dan kasus-kasus lainnya. kondisi ini menandakan rawannya wilayah perbatasan dari ancaman pelanggaran wilayah, hal tersebut terjadi karena pasukan pengaman perbatasan belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena terbatasnya infrastruktur jalan, sementara itu masyarakat di sepanjang perbatasan bila akan menuju Entikong diperlukan biaya yang tinggi sehingga ada kecenderungan untuk mencari jalan yang terdekat dengan biaya yang murah, seperti yang disampaikan oleh Martius, Warga Sungkung di kecamatan Entikong mengungkapkan, Setiap kali ingin menjual hasil pertanian mereka lebih memilih ke negeri tetangga Malaysia, walau harus berjalan kaki tiga hingga enam jam dibandingkan ke ibu kota kecamatan dengan waktu lima hingga delapan jam perjalanan menggunakan perahu motor. Untuk penjualan hasil bumi ke Malaysia, karena jaraknya relatif singkat, dan tidak butuh biaya besar, seperti butuh solar [10].

Grafik 1. Tentang Perbandingan Pembangunan Jalan dan Tindak Kejahatan di Entikong Tahun 2005-2010.

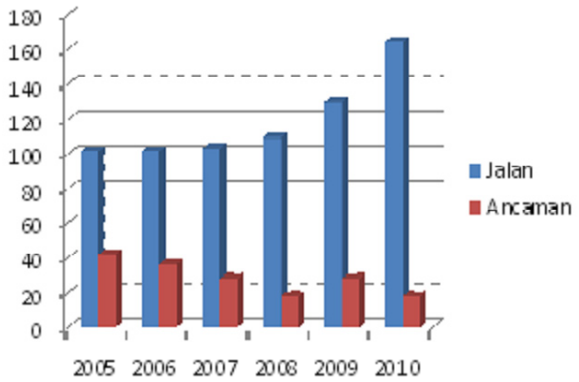

Grafik di atas. Secara umum terlihat bahwa ancaman keamanan setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2005 panjang jalan di Entikong 101,5 km dan ancaman pada tahun 2006 dengan panjang jalan keamanan yang terjadi sebanyak 42 kali, sedangkan yang belum ada penambahan, kasus yang terjadi menurun menjadi 36 kali, hal ini dapat terjadi kemungkinan pelaksanaan patroli pospamtas yang tepat. Pada tahun 2007 dengan adanya penambahan panjang jalan 103,4 km, kasus yang terjadi 28 kali. Sedangkan pada tahun 2008 dengan penambahan 109,3 km, kasus yang terjadi juga menurun menjadi 18 kali. Namun pada tahun 2009 pengembangan jalan bertambah menjadi 129,4 km, kasus yang terjadi kembali meningkat, tetapi pada tahun 2010 pengembangan jalan bertambah menjadi 164,27 km, kasus yang terjadi kembali menurun menjadi 18.

Ditinjau dari data pengembangan panjang jalan dan data kasus/ancaman yang terjadi di setiap tahunnya, tergambar bahwa semakin panjang infrastruktur jalan berbanding terbalik

dengan kasus kejahatan.

Kondisi tersebut terjadi kemungkinan karena pengembangan pembangunan jalan terkonsentrasi pada jalan di wilayah pedesaan di sepanjang perbatasan, walaupun berupa jalan tradisional (tanah) yang dapat di manfaatkan oleh pasukan Satgaspamtas sebagai sarana kegiatan patroli. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan dengan bertambahnya panjang jalan maka ancaman menjadi berkurang artinya bahwa terbatasnya infrastruktur jalan di sepanjang wilayah perbatasan Entikong merupakan salah satu faktor mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dapat mengancam pertahanan di wilayah perbatasan Entikong.

Pola Jaring Jalan Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Di Wilayah Perbatasan Entikong

Breheny (1995) (dalam Banister 1995) [11] mengatakan transportasi memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan daerah dan ekonomi kota dan wilayah, selanjutnya dalam Undang-undang no 38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa jalan mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan [12]. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa fungsi jalan diperlukan untuk kepentingan pertahanan maupun untuk kepentingan perkembangan daerah dan ekonomi wilayah, artinya bahwa pengembangan infrastruktur jalan di sepanjang perbatasan Entikong selain untuk kepentingan pertahanan juga untuk kepentingan pengembangan derah dan ekonomi wilayah perbatasan.

Pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Entikong hanya bertumpu pada jalan poros utama/jalan negara sehingga pengembangan kota berkembang di sepanjang jalan negara. Menurut *Babcock (1932)* dengan teori poros menekankan peran transportasi dalam mempengaruhi perkembangan dalam struktur ruang kota. Faktor utama yang mempengaruhi mobilitas adalah poros transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan daerah bagian luarnya. Daerah yang dilalui transportasi akan mengalami perkembangan fisik yang berbeda dengan daerah diantara jalur-jalur transportasi. Perkembangan zone-zone yang ada pada daerah sepanjang poros transportasi akan terlihat lebih besar dibandingkan dengan daerah yang terletak diantaranya. Teori tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya poros jalan akan berdampak pada perkembangan fisik di sepanjang poros tersebut. Kondisi jaring jalan di wilayah Entikong selaras dengan teori tersebut sehingga wilayah Entikong tidak dapat berkembang ke wilayah pedalaman. Akibat pengembangan jaring jalan yang hanya berupa poros jalan utama mengakibatkan aksesibiltas wilayah perbatasan menjadi rendah karena tidak terdapat simpul-simpul jalan yang dapat melayani barang dan orang ke wilayah pedalaman, baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun pertahanan. Dihadapkan pada kepentingan tugas pengamanan perbatasan yaitu dengan melaksanakan kegiatan patroli keamanan di sepanjang wilayah perbatasan diperlukan infrastruktur jalan di sepanjang perbatasan, sementara itu kondisi jaring jalan di Entikong yang hanya berupa poros jalan utama hanya dapat memberikan simpul di kota kecamatan Entikong, tidak dapat melayani kepentingan dari daerah pedalaman, artinya belum dapat melayani keperluan pelaksanaan tugas patroli dan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan strategi pertahanan

di wilayah perbatasan Entikong perlu didukung infrastruktur jalan yang memadai. Hal tersebut dapat kita lihat dari analisis pengembangan jalan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan, kecepatan pengerahan pasukan dari satuan atas, terjadinya ancaman, dan pola jaring jalan menunjukkan :

Pertama, Terbatasnya infrastruktur jalan di sepanjang wilayah perbatasan Entikong mengakibatkan sulitnya satuan tugas pengamanan perbatasan dalam melaksanakan tugas pengamanan;

Kedua, Kondisi struktur badan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kecepatan pengerahan perkuatan dari satuan atas dalam mendukung pertahanan di wilayah perbatasan Entikong menjadi lambat;

Ketiga, Terbatasnya infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Entikong juga dapat mengakibatkan terjadinya ancaman;

Keempat, Pola jaring jalan dengan sistem poros jalan utama, kurang optimal dalam mewujudkan strategi pertahanan di wilayah perbatasan Entikong.

DAFTAR REFERENSI

[1]. Subarkah (1984) Vademekum Lengkap Teknik Sipil. Jakarta : Idea Dharma, Hal. 417.

[2]. David Banister (1995) *Transport And Urban Development,* Rochester NY .

[3]. Undang-undang no 38 tahun 2004, Tentang Jalan, Bab III bagian pertama, peran jalan, pasal 5, (1)

[4]. Ronny *Kountur*, (2007). Metode Penelitan. Jakarta : PPM, Hal. 174

[5]. Nurul *Zuriah*, (*2006).* Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Bumi Aksara. Jakarta, Hal. 47

[6]. Disampaikan Dansatgaspamtas Letkol Inf Tri Saktiyono pada FGD tanggal 7 Juli 2011

[7]. Subarkah (1984) Vademekum Lengkap Teknik Sipil. Jakarta : Idea Dharma, Hal. 417.

[8]. Disampaikan Bp Jalianus, Staf Kantor Kecamata, saat FGD , di Entikong, tanggal 7 juli 2011

[9]. Disampaikan Dansatgaspamtas, Letkol Inf Tri Saktiyono, saat FGD, di Entikong tanggal 7 Juli 2011

[10]. Catatan akhir tahun beranda negara yang masih tertinggal file:///D:/catatan-akhir-tahun-beranda-negara-yang-masih tertinggal. htm, diunduh tanggal 13 Juli 2011.

[11]. David Banister (1995) *Transport And Urban Development,* Rochester NY .

[12]. Undang-undang no 38 tahun 2004, Tentang Jalan, Bab III bagian pertama, peran jalan, pasal 5, (1)